

KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Siti Baro'ah

Dosen Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Institut Agama Islam Imam Ghazali (IAIG) Cilacap
email: mbaieie@gmail.com

Abstrak

Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas siswa yang dikembangkan dengan cara membebaskan siswa dari ketidak tahuan dan ketidak mampuan. Dengan adanya pendidikan yang bermutu maka akan terlahir generasi atau sumber daya manusia yang unggul dalam segala aspek kehidupan. Banyak kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti kebijakan merdeka belajar. Institusi pendidikan juga tidak kalah tertinggal dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas pembelajarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian deskriptif dalam hal ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kebijakan merdeka belajar sebagai usaha meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan sumber yang diambil yaitu dari buku -buku ilmiah yang sudah diterbitkan dengan maksud untuk dijadikan sebagai bahan referensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, terkait dengan diterapkannya kebijakan merdeka belajar bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran, komitmen dari guru, serta kreatifitas dan dukungan dari kepala sekolah.

Kata kunci: Kebijakan Merdeka Belajar, Mutu Pendidikan

A. Pendahuluan

Saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat khususnya dalam upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan global. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul turut mendukung kemajuan bangsa, terlebih dalam menghadapi era revolusi industri seperti sekarang ini, bangsa Indonesia harus menghadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan.

Kualitas sumber daya manusia di Indonesia saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Salah satu faktor utama rendahnya kualitas sumber daya manusia tentu erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Program pendidikan nasional yang dirancang diyakini belum mampu menjawab harapan dan tantangan di masa depan. Dalam menghadapi hal ini, pendidikan yang bermutu merupakan sesuatu yang sangat berharga dan menjadi sebuah keharusan, karena pendidikan memainkan peranan yang sangat fundamental dimana cita-cita suatu bangsa dan negara dapat tercapai.

Menurut Mulyasa (2010) dewasa ini upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Mutu pendidikan merupakan faktor penting yang harus diwujudkan dalam proses pendidikan.

Menghadapi masa depan yang sudah pasti akan dipenuhi dengan arus globalisasi dan keterbukaan serta kemajuan informasi dan teknologi, pendidikan akan semakin dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Untuk itu, pembangunan di sektor pendidikan perlu dirancang agar berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul dapat diatasi. Dunia pendidikan nasional perlu dirancang agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan pada era globalisasi seperti sekarang ini.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Merdeka Belajar

a. Hakikat Kebijakan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan berasal dari kata bijak yang memiliki arti selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan), cerdas, dan pandai bercakap-cakap. Dalam bahasa Inggris kebijakan diartikan sebagai "*policy*" yang berarti *plan of action* atau *statemen of aims*. Adapun yang dimaksud kebijakan disini yaitu pernyataan cita-cita, tujuan, harapan, atau prinsip untuk mencapai sasaran. Dalam hal ini kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka bersama dalam mencapai tujuannya. Ketika berbicara mengenai kebijakan tentu pikiran kita akan tertuju dengan pemerintah dan urusan publik, dan yang akan dibahas disini adalah mengenai kebijakan pendidikan. Latar belakang diperlukannya kebijakan pendidikan salah satunya adalah tujuan negara, dimana tujuan negara tersebut adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya.

Menurut HAR. Tilaar (2009) Kebijakan pendidikan diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana

dikemukakan oleh Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Pendidikan, mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan landasan kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan. Kebijakan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dijabarkan dalam berbagai kebijakan pendidikan.

Undang-undang Sisdiknas merupakan pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan proses pendidikan maupun mengadakan standarisasi pendidikan. Undang-undang ini mencakup kedalam komponen-komponen pendidikan baik dalam segi konsep, teknis maupun aplikasi yang tentunya berperan penting dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Selain itu, sistem pendidikan nasional juga menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan arah pendidikan, karena satu langkah keputusan untuk menentukan kebijakan pendidikan yang diambil akan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan itu sendiri. Agar dampak negatif dari suatu kebijakan dapat diminimalisir maka diperlukan suatu efektivitas dan efisiensi dalam proses penentuan kebijakan pendidikan.

b. Merdeka Belajar

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI (Kemendikbud RI) beberapa bulan lalu menegaskan bahwa ada kebijakan baru dalam dunia pendidikan, kebijakan tersebut yaitu “Merdeka Belajar”. Merdeka belajar merupakan kebijakan baru yang dicetuskan oleh Bapak menteri yang tergabung dalam kabinet Indonesia maju Nadiem Anwar Makarim. Merdeka belajar terlahir dari banyaknya problem yang ada dalam pendidikan, terutama yang terfokus pada pelaku atau pemberdayaan manusianya.

Setelah diterapkannya kebijakan Merdeka Belajar, nantinya akan terjadi banyak perubahan terutama dari sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang sekarang hanya dilaksanakan di dalam kelas akan berubah dan dibuat senyaman mungkin agar mempermudah interaksi antara murid dan guru. Salah satunya yaitu belajar dengan *outing class*, dimana *outing class* ini adalah salah satu program pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas agar siswa memiliki keterampilan dan

keahlian tertentu. *Outing class* juga merupakan metode belajar yang menyenangkan, mengajarkan para siswa untuk lebih dekat dengan alam dan lingkungan sekitar. Selama pembelajaran dengan menggunakan metode ini, guru dan siswa akan lebih dapat membangun keakraban, lebih santai, dan tentunya lebih menyenangkan. Dengan setiap hari belajar di dalam kelas selama bertahun-tahun tentunya sudah menjadi hal yang lumrah atau bahkan membosankan, jadi tidak ada salahnya jika kita sebagai pendidik memberikan sesuatu yang berbeda pada proses pembelajaran.

Sistem pembelajaran akan didesain sedemikian rupa agar karakter siswa terbentuk, dan tidak terfokus pada sistem perangsangan yang menurut beberapa penelitian hanya meresahkan, tidak hanya bagi guru tetapi juga anak dan orang tuanya. Selain itu, dengan perangsangan nantinya juga akan muncul diskriminasi dimana ada pelebelan antara si pintar dan si bodoh. Hal ini tentu sangat keliru jika diterapkan dalam dunia pendidikan, karena pada hakekatnya anak memiliki kecerdasan masing-masing di dalam dirinya atau yang sering disebut dengan *multiple intelegent*. *Multiple intelegent* merupakan teori yang dikembangkan oleh Dr. Howard Gardner seorang ahli psikologi modern di Harvard University, dimana menurut Gardner kecerdasan diartikan sebagai kapasitas untuk memecahkan masalah dan untuk menciptakan produk di lingkungan yang kondusif dan alamiah. Potensi yang dimiliki oleh anak sekecil apapun harus dihargai, banyak anak yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam belajar akan tetapi jika kecerdasannya dihargai dan terus dikembangkan maka anak tersebut akan menjadi anak unggulan pada bidangnya. Sehingga nantinya akan terbentuk pribadi yang kompeten, serta memiliki karakter yang tertanam dalam dirinya.

2. Konsep Merdeka Belajar

Sebelum melaksanakan suatu kegiatan kita membutuhkan sebuah konsep agar apa yang akan kita lakukan dapat terurut dan terurus secara baik. Konsep merdeka belajar yang digaungkan oleh Nadiem Makarim terdorong dari keinginannya untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia dan menyenangkan tanpa dibebani dengan nilai dan target pencapaian tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI terkait dengan konsep merdeka belajar adalah:

a. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) resmi menghapus Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mulai tahun ini. Penghapusan USBN merupakan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nadiem Makarim yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Hal ini berarti pembuatan soal maupun penyelenggaraan USBN akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Sekolah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan ujian, karena diselenggarakan oleh sekolah maka menjadi tugas pemerintah daerah melalui dikbud untuk memonitor dan mengevaluasi serta memastikan bahwa ujian yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah ujian yang berkualitas. Hal ini penting untuk dilakukan karena erat hubungannya dengan mutu pendidikan. Dikbud harus memfasilitasi terutama dari segi anggaran agar pelaksanaan ujian berjalan lancar, selain itu juga harus mengadakan pelatihan pembuatan soal yang sesuai dengan standar atau kriteria yang harus dipenuhi.

b. Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar, dan menengah. UN merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah telah diselenggarakan sejak puluhan tahun lalu dan telah berulang kali mengalami perubahan pada setiap periodenya.

Ujian Nasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi momok yang sangat menakutkan dan menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Banyak sekali paradigma dan anggapan-anggapan mengenai Ujian Nasional, namun tahun ini UN disambut dengan rasa penuh suka cita, pasalnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim telah memutuskan untuk menghapuskan UN. Dengan dihapuskannya UN ini, diharapkan akan membuat siswa tidak mengalami tekanan beban mental, karena kelulusannya dari jenjang pendidikan tertentu tidak ditentukan oleh nilai yang diperoleh hanya dalam beberapa hari saja. Namun dengan begitu bukan berarti tidak ada yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Ujian Nasional akan diganti dengan sistem yang baru, yaitu Assesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Konsep ini merupakan penyederhanaan dari sistem UN, berbeda dengan UN yang dilakukan pada akhir jenjang pembelajaran, asesmen ini akan dilaksanakan ketika anak duduk di kelas 4, 8 dan 11. Dan hasil dari assesmen ini akan dijadikan sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Selain asesmen kompetensi, akan diberlakukan juga survei karakter, dimana survei karakter ini digunakan untuk

mengetahui karakter anak dan bagaimana keadaan lingkungan di sekolah. Survei karakter juga digunakan untuk menjadi indikator atau tolak ukur agar sekolah memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajaran, terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai karakter ke dalam diri siswa. Sehingga nantinya nilai karakter tersebut akan terinternalisasi ke dalam diri siswa yang secara otomatis akan berdampak pada prestasi dan kualitas siswa tersebut.

c. RPP

Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disingkat dengan RPP merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar. Seorang guru sebelum masuk kelas wajib menyusun RPP agar pembelajaran yang dilakukan lebih terarah dan sesuai indikator yang dikembangkan. Kebijakan baru terkait dengan penyusunan RPP telah dikeluarkan oleh menteri pendidikan yang tertuang dalam Surat Edaran No 14 tahun 2019 tentang Penyederhanaan RPP. Berbeda dengan RPP sebelumnya yang mencakup lebih dari sepuluh komponen, pada RPP yang baru terjadi penyederhanaan yaitu hanya terdapat 3 komponen inti dalam RPP yang sesuai dengan edaran menteri pendidikan no 14 tahun 2019 yaitu; tujuan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau assesment. Dengan adanya kebijakan ini, guru akan lebih mudah dan diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP seefektif dan seefisien mungkin, akan tetapi tetap berorientasi pada perkembangan anak.

d. Memperluas sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru

Sistem zonasi adalah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Zonasi merupakan salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tercipta pemerataan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sebenarnya sistem ini sudah diberlakukan sejak masa menteri sebelumnya, akan tetapi ada perbedaan dalam pelaksanaannya dengan sistem zonasi yang sekarang ini. Tentunya sebelum diterapkan, sistem ini sudah dilakukan pengkajian, serta memperhatikan rekomendasi dari lembaga-lembaga yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi.

Salah satu perbedaan yang mendasar dari sistem zonasi yang lalu dengan era menteri sekarang adalah kuota siswa dari jalur zonasi. Sistem zonasi yang awalnya memiliki kuota minimum 80% dari kuota total 100%, sisanya diperuntukan untuk jalur prestasi dan perpindahan. Pada sistem zonasi yang sekarang berubah menjadi jalur zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan 5%, dan jalur prestasi 30 persen. Perubahan persentase

melalui jalur prestasi bertambah yang awalnya hanya 15% menjadi 30%, hal ini dilakukan karena ada kasus di beberapa daerah yang mengalami kesulitan atas diberlakukannya sistem zonasi lama, dengan adanya perubahan pada presentase tersebut diharapkan mekanisme penerimaan siswa baru bisa mengakomodasi perbedaan situasi dan kondisi pada setiap daerah. Zonasi ini tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah dan siswa, tetapi juga menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas guru di suatu daerah yang nantinya akan menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah.

3. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

a. Mutu Pendidikan

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan oleh pelanggan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dapat dilihat mulai dari input, proses, dan output. Menurut Philp B. Crosby kualitas atau mutu adalah *conformance to requirement* yaitu sesuai yang diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan proses jadi.

Untuk menjawab tantangan Nasional dan Internasional maka perlu menerapkan pendidikan bermutu. Dimana pendidikan bermutu merupakan kunci untuk membangun manusia yang kompeten dan beradab dalam arti menghasilkan output yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kesadaran akan mutu pendidikan akhir-akhir ini kian meningkat, hal ini terlihat dari keseriusan berbagai institusi pendidikan untuk meningkatkan daya saing, efektivitas, pelayanan, dan transparansinya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika peningkatan mutu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Meskipun kenyataannya pendidikan nasional indonesia saat ini masih belum sesuai dengan harapan para peserta didik, pendidik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri, baik dari kualitas maupun kuantitas.

Dari segi kuantitas merujuk pada suatu seberapa besar suatu program pendidikan dapat mencapai sasaran, sedangkan dari segi kualitas mengarah pada nilai dari suatu produk yang dikeluarkan. Dari segi kuantitas jumlah anak yang sekolah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, namun dari segi kualitas dunia pendidikan di Indonesia belum mampu memenuhi tuntutan dunia global. Dan yang paling memprihatinkan akhir-akhir ini kualitas akhlak masyarakat Indonesia semakin jauh dari

nilai pancasila. Hal ini dapat terlihat dari sikap anarkisme dari para demonstran yang menyuarakan aspirasinya ,serta maraknya kejahatan yang terjadi.

Strategi peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda penting pemerintah (kemendikbud), berbagai terobosan dan kebijakan telah diambil dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu. Salah satu program pemerintah yang sekarang adalah kebijakan merdeka belajar. Salah satu ide pokok dari kebijakan merdeka belajar tersebut adalah terfokus pada kemerdekaan sumber daya manusianya. Merdeka dalam arti terbebas dari ketakutan dan terbebas dari tuntutan. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional, dan harus benar-benar direalisasikan pada setiap satuan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

b. Strategi peningkatan mutu

Dalam kebijakan merdeka belajar, terdapat faktor utama yang menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu

1) Proses pembelajaran

Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran akan terjadi hubungan timbal balik antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran hendaknya dirancang agar dapat menumbuhkan motivasi dan mendukung siswa untuk memiliki empat kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi bangsa dalam menghadapi abad 21. Keempat kompetensi tersebut sering disebut dengan 4C yaitu *communication* (komunikasi), *collaboration* (kerjasama), *critical thinking*(berpikir kritis), *creativity* (daya cipta). Selain empat kompetensi tersebut, pendidikan juga harus menumbuhkan karakter pada diri siswa. Dimana pendidikan karakter dalam konteks saat ini sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang menimpa generasi muda di negara ini. Dengan dimasukkannya keempat kompetensi dengan ditambah penguatan pendidikan karakter diharapkan akan menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas.

2) Kemerdekaan dan komitmen guru

Dalam pendidikan guru memiliki peran yang sangat penting, karena sebaik apapun sistem pendidikan tanpa didukung dengan adanya guru yang bermutu maka sistem itu tidak akan berfungsi. Guru juga merupakan orang yang paling bertanggungjawab untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang serasi agar

terjadi proses belajar yang efektif. Terkait pada point pertama yaitu proses pembelajaran, dimana proses pembelajaran yang menyenangkan, penuh dengan kreativitas dan inovasi akan mendorong termotivasinya anak dalam belajar. Oleh karena itu, dalam kebijakan ini, guru lebih ditekankan pada proses pembelajarannya, bukan pada administrasinya. Dengan berkurangnya beban guru terkait dengan administrasi maka diharapkan para guru akan lebih meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam pembelajaran.

Selain itu, dalam kebijakan ini guru juga diharapkan memiliki dua kompetensi tambahan yaitu *Computational Logic* dan *Compassion*. *Cumputational logic* adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh dan logis. Ketika sudah terbiasa dengan kompetensi ini, guru akan lebih berpikir kritis sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan secara efektif dan efisien. *Compassion* ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru ketika mengajar, karena *compassion* ini secara tidak langsung akan membangun integritas. Seorang guru harus memiliki minat dan bakat yang tinggi dalam profesinya. Dalam artian guru harus mencintai profesi yang ditekuninya, karena ketika seseorang telah memiliki *compassion* maka akan memiliki motivasi yang tinggi untuk terus memperbaiki dan mengembangkan diri. Dengan menguasai kompetensi yang sudah ada, dengan ditambah dua kompetensi baru tersebut, diharapkan kemampuan guru tidak diragukan lagi dan guru bebas melaksanakan aktivitas pembelajaran secara kreatif dan inovatif.

3) Kepemimpinan kepala sekolah

Salah satu kunci yang sangat menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya adalah kepala sekolah. Keberhasilan kepala sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan secara dominan ditentukan oleh keandalan manajemen sekolah yang bersangkutan, sedangkan manajemen sekolah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolah. Dalam lingkungan pendidikan, kepemimpinan pendidikan adalah kepemimpinan yang fokus pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam manajemen sekolah, kepala sekolah harus memastikan hubungan ekosistem yang ada disekolah antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, dan seluruh warga sekolah harus terjalin dengan baik. Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan visioner dan memiliki kreatifitas yang tinggi.

Kedua kemampuan tersebut terlihat dari sikap demokratis, kreatif, dan keteladanan yang tampak dalam diri kepala sekolah.

- a) Demokratis, yang dimaksud demokratis disini yaitu kepala sekolah harus memahami keberadaan guru, baik segi kelebihan maupun kelemahannya. Kepala sekolah yang demokratis selalu menerima masukan dari guru dan secara terus menerus memberikan bimbingan yang efektif. Kepala sekolah yang demokratis harus memberikan kesempatan kepada guru untuk lebih kreatif, dan tidak menghambat setiap kemajuan yang tampak dalam diri guru yang menjadi mitra kerjanya.
- b) Kreatif, kepala sekolah harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk kemajuan sekolah yang dipimpinnya. Kreativitas tinggi ini menyangkut tiga dimensi yaitu proses, person, dan produk. Dalam artian dengan menggunakan proses yang bervariasi sebagai kriteria dari kreativitas maka segala produk yang dihasilkan akan menjadi produk yang kreatif.

Menjadi teladan baik secara moral maupun profesional. Secara moral artinya perilaku kepala sekolah benar-benar menjadi teladan baik bagi guru, siswa maupun masyarakat. Secara profesional kepala sekolah harus mampu membuktikan bahwa dalam bekerja tidak hanya didasarkan pada ego atau keinginannya saja, akan tetapi menggunakan pedoman dan prinsip yang jelas. Dengan demikian sasaran yang dicapai akan sesuai dengan kriteria profesional yang ditetapkan. Dalam rangka pencapaian mutu, kepala sekolah menjadi vital peranannya, karena sekolah yang bermutu akan tergambar dari kebijakan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya.

C. Kesimpulan

Mutu dalam dunia pendidikan merupakan suatu hal yang membedakan antara baik dan yang sebaliknya. Sehingga jelaslah bahwasannya mutu merupakan masalah pokok yang akan menjamin suatu lembaga pendidikan dalam meraih status di tengah-tengah persaingan dunia pendidikan. Pendidikan merupakan proses pemberdayaan yang diharapkan mampu memperdayakan peserta didik menjadi manusia yang cerdas, manusia berilmu dan berpengetahuan, serta manusia terdidik. Oleh karena itu pendidikan yang bermutu merupakan suatu keharusan yang harus dibenahi oleh seluruh institusi pendidikan. Pemerintah juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya sekedar menjadi pihak yang berwenang menyalurkan dana, akan tetapi pemerintah juga berwenang

untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu. Sepertihalnya gebrakan baru mengenai merdeka belajar yang diharapkan akan memberikan kontribusi lebih terhadap pengembangan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset dan potensi bangsa yang sangat penting untuk mengisi pembangunan di berbagai bidang.

Daftar Pustaka

- HAR. Tilaar. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2009
- Husaini Usman. *Manajemen Teori,Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta:BumiAksara. 2013.
- Made Pirdata. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara. 1998.
- Moh. Yamin. *Ideologi & Kebijakan Pendidikan, Menuju Pendidikan Berideologis dan Berkarakter*.Malang : Madani. 2013
- Munif Chatib. *Gurunya Manusia, Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*. Bandung :Kaifa. 2013
- Syaiful Sagala. *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Syaiful Sagala. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat (strategi memenangkan persaingan mutu)*. Jakarta:Nimas multima. 2004.
- Widya Ningsih. "Merdeka Belajar melalui Empat Pokok Kebijakan Baru di Bidang Pendidikan ". Diakses tanggal 2020-04-14.
- Media, Kompas. "Terobosan Merdeka Belajar Nadiem Makarim, Ubah Sistem Zonasi hingga Hapus UN". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2020-04-14.